

UPAYA PENYUSUNAN MASTERPLAN INVESTASI DI KABUPATEN BREBES SEBAGAI IMPLIKASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Caroline¹ dan Abdul Syakur¹

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Fatah Demak
Sultan Fatah 83 Demak Jawa Tengah Indonesia

Diterima 20 September 2010/Disetujui 6 Nopember 2010

Abstract: *Implementation of Regional Autonomy which has been running for approximately 10 years in Brebes requires a lot of cost, it would require a special attraction for investors willing to invest in Brebes. Starting from this thought, required the preparation of Brebes Investment Master plan, which is expected to spur economic growth and increase revenue Brebes. The conclusions of this study is: based on SWOT analysis that has to be got 2 (two) strategic positions, namely: Strategic Position I: Industry, in this position take advantage of all opportunities in the industrial sector is to survive the competition of industry, namely the development and optimization of existing potential, the increase in industrial infrastructure. Strategic Position IV: agriculture, animal husbandry, fisheries, tourism in this position needs to be prioritized development strategy is the diversification of products to increase sales volume.*

Keywords: *investment masterplan, regional autonomy, SWOT, shift share*

Abstrak: *Pelaksanaan Otonomi Daerah yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun di Brebes membutuhkan banyak biaya, maka diperlukan daya tarik tersendiri bagi investor bersedia berinvestasi di Brebes. Mulai dari pemikiran ini, diperlukan penyusunan Masterplan Investasi Brebes, yang diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan Brebes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis SWOT yang harus mendapat 2 (dua) posisi strategis, yaitu strategis posisi I adalah Industri. Posisi ini memanfaatkan semua peluang di sektor industri untuk bertahan hidup dalam persaingan industri berupa pengembangan dan optimalisasi potensi yang ada, peningkatan infrastruktur industri. Kemudian posisi strategis IV adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Posisi ini perlu strategi pembangunan dengan prioritas pada diversifikasi produk untuk meningkatkan volume penjualan.*

Kata kunci: *masterplan investasi, otonomi daerah, SWOT, shift share*

PENDAHULUAN

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang

semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang, dan industri ke daerah.

Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin, dan alat-alat produksi. Se-

lain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (*SDM/human capital*) yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya buat mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000).

Pengalaman Indonesia selama ini juga menunjukkan betapa pentingnya investasi bagi kelangsungan Pembangunan atau Pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data BPS, sejak awal 2000 ini, PDB Indonesia memang mengalami pertumbuhan positif, setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya negatif. Namun laju pertumbuhannya sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yang dialami Indonesia pada periode pra krisis. Alasannya sederhana, pergerakan ekonomi nasional sejak akhir 1999 hingga kini lebih didorong oleh pertumbuhan konsumsi bukan oleh pertumbuhan investasi yang signifikan jika pola pertumbuhan ekonomi terus seperti ini tanpa adanya kontribusi yang berarti dari investasi, dapat dipastikan pertumbuhan tersebut tidak dapat berlanjut terus (Tambunan, 2000)

Makin besar arus masuk investasi dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Impikasinya antara lain, meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat penanaman modal langsung (*direct investment*) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan transfer kemampuan manajerial.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi, pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan berbagai upaya di antaranya adalah dengan peningkatan program promosi dan pengembangan kerjasama regional, nasional maupun internasional. Dengan semakin mantap akan dikembangkannya Kabupaten Brebes sebagai kota bisnis melalui kegiatan perdagangan, industri dan pariwisata berskala nasional dan internasional, maka pemahaman yang lebih menyeluruh tentang arti penting pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu

dikembangkan dan dijadikan dasar pengembangan investasi.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangian pendapatan masyarakat serta mendorong agar pertumbuhan ekonomi selalu berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai ini mengandung konsekuensi bahwa penggalan potensi-potensi yang terdapat di daerah senantiasa dilakukan untuk mendorong tumbuhnya investasi baru yang dapat menstimulus perekonomian ke arah yang lebih maju.

Untuk mengoperasionalkan *Grand Strategy* Investasi Kabupaten Brebes diperlukan perencanaan yang lebih detail yang mencakup perencanaan dan indikator program tahunan, serta dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Brebes, maka diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah untuk merencanakan program investasi tahunan yang tercakup dalam suatu dokumen Masterplan Investasi Kabupaten Brebes.

Kedudukan dokumen Masterplan Investasi ini diarahkan sebagai panduan atau pedoman bagi perencanaan investasi yang akan dilakukan dan dikembangkan pada Kabupaten Brebes yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan investasi yang penyusunannya mengacu dan terintegrasi dengan *Grand Strategy* Investasi Kabupaten Brebes yang telah disusun sebelumnya, sehingga kedudukan *Master plan* Investasi ini sebagai suatu wadah hukum dalam mengintergrasikan setiap kebijakan investasi yang ada di Kabupaten Brebes yang mana dokumen ini belum dimiliki oleh Kabupaten Brebes.

Pertumbuhan Ekonomi. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk mening-

katkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut Sukirno (2006:10), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain pertumbuhannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar dibandingkan kurun waktu sebelumnya.

Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian yang dinyatakan dalam suatu tahun tertentu disebut dengan *Gross Domestic Product* (GDP). *Gross Domestic Product* dapat dihitung melalui pendekatan produksi yaitu dengan cara menjumlahkan sembilan sektor-sektor ekonomi (1) sektor pertanian; (2) sektor pertambangan; (3) sektor industri; (4) sektor listrik dan air bersih; (5) sektor bangunan; (6) sektor perdagangan; (7) sektor angkutan; (8) sektor keuangan, dan (9) jasa-jasa lain.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah beserta masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan. Tujuan kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta adalah untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuat prediksi tentang semua potensi sumberdaya yang ada sehingga dapat dipergunakan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Konsep Wilayah dan Perkembangan Daerah. Menurut Hakim, dkk (2002) wilayah

adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Wilayah berasal dari bahasa Arab "wala-yuwali-wilayah" yang mengandung arti dasar "saling tolong menolong, saling berdekatan baik secara geometris maupun *similarity*". Contohnya: antara *supply* dan *demand*, hulu-hilir. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/*development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan.

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah (1) Sebagai *growth center*. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spred effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional; (2) Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antardaerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah; (3) Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan; (4) Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003).

Ketimpangan Pendapatan Wilayah. Me-

nurut Syafrudin (Sutawijaya, 2004:39), Williamson membuat suatu langkah dengan menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional di suatu negara. Williamson menggunakan data tabel silang dari 24 negara dan menemukan bahwa negara dengan kesenjangan pendapatan wilayah terbesar selalu diikuti sekelompok negara dengan tingkat pendapatan per kapita menengah, di mana kesenjangan wilayah yang relatif kecil ditemukan baik di negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi maupun negara berkembang.

Investasi. Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa mendatang. Dalam investasi tercakup 2 (dua) tujuan utama, yakni untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi), dan tambahan penyediaan modal yang ada atau investasi netto (Lewis, 1993). Para pelaku investasi adalah (1) Pemerintah; (2) Swasta; dan (3) Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta.

Teori investasi pada dasarnya menjelaskan bagaimana proses pembuatan keputusan dilakukan oleh calon penanam modal untuk memilih jenis dan besar proyek yang akan diambil. Dalam hal ini diasumsikan bahwa keputusan yang diambil oleh calon penanam modal dipengaruhi oleh tingkat bunga (*interest rate*). Investasi merupakan usaha menanamkan faktor-faktor produksi langka dalam proyek-proyek tertentu. Proyek dapat bersifat baru sama sekali maupun berupa perluasan proyek yang sudah ada.

Tujuan utama investasi adalah memperoleh berbagai macam manfaat yang layak di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan keuangan, non keuangan, atau kombinasi keduanya. Manfaat non-keuangan misalnya penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan ekspor, substitusi impor, atau pemanfaatan bahan baku dalam negeri yang melimpah.

Sumber Pembiayaan Investasi. (1) **Sumber Konvensional (UU 33 Tahun 2004).** Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 5 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari:

(a) **Pendapatan Asli Daerah** yaitu Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah;

(b) **Dana Perimbangan. Dana Bagi Hasil** yang terdiri dari **Pajak** yaitu Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri. **Penerimaan dari Sumber Daya Alam** yaitu Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi. **Dana Alokasi Umum**; dan **Dana Alokasi Khusus** yaitu Lain-lain Pendapatan seperti Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, dan Pendapatan Bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

(2) **Sumber Pembiayaan Non Konvensional. Sumber pembiayaan melalui pendapatan (Revenue Financing)** berasal dari:

(a) Pendapatan Pemerintah melalui pungutan perbaikan (*Betterment Levies*) yaitu Pungutan perbaikan merupakan tagihan modal yang ditujukan untuk menutupi atau membiayai biaya modal dari investasi prasarana. Hal ini dapat dikenakan pada suatu kawasan dimana biaya peningkatan mutu lingkungan hidup langsung dibebankan pada nilai tanah. Perbaikan mutu lingkungan hidup mencakup antara lain pembuatan trotoar, jalan besar, saluran air limbah, dan taman-taman.

(b) Pendapatan Swasta (*Private Revenue Financing*) yaitu Bentuk dari ini antaranya adalah biaya dampak pembangunan (*Development Impact Fees*) dan Biaya Sambungan (*Connection Fees*) contohnya air bersih, telepon dan pembuangan kotoran, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh perusahaan jasa pelayanan kepada individu.

Tabel 1. Sumber Pembiayaan Non Konvensional

Instrumen Aktor Pembangunan	Kekayaan	Hutang	Pendapatan
Pemerintah	Lahan, Bangunan	Obligasi	Batterment Levies
Swasta		<i>Development Exactions</i>	Biaya dampak pembangunan, dampak sambungan
Pemerintah & Swasta	Joint Venture, Konsesi, (BOO, BOT, Leasing)	<i>Excess Comdemnation Linkage</i>	Konsolidasi Lahan

(c) Pendapatan Pemerintah-Swasta. Salah satu bentuknya adalah konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan merupakan suatu usaha pengaturan kembali pemilik lahan dengan tujuan agar penggunaan lahan akan menjadi lebih baik dan optimal dalam pengertian kelestarian, pemanfaatan dan produktivitas. Sasaran konsolidasi lahan adalah melalui pemberian sertifikat kepada pemilik lahan, sehingga dapat memberikan masukan kepada pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sumber pembiayaan melalui hutang (*Debt Financing*) yaitu

Hutang Pemerintah melalui obligasi. Di dalam Pasal 79 dan 81 UU No. 22 Tahun 1999 jo pasal 3 UU No. 25 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan daerahnya tanpa meminta persetujuan dahulu dari pusat. Pinjaman yang dimaksud untuk pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur.

Hutang swasta melalui *Development Exactions (DE)*. *Development Exactions* dikenakan pada *developer* dalam rangka pembangunan prasarana dalam lingkungan area pembangunan, sebagai salah satu syarat pembangunan dimulai, seperti jalan, saluran air bersih, saluran air kotor, dan lain-lain. Besarnya pungutan pada DE berdasarkan negosiasi antara *developer* dengan institusi yang mewakili aktivitas yang bersangkutan. Keuntungan DE adalah tidak ada biaya konstruksi yang ditanggung.

Hutang Swasta-Pemerintah melalui *Excess Comdemnation* dan *Linkage*.

Excess Comdemnation merupakan metode pembiayaan prasarana secara tidak langsung dima-

na sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana dan sejumlah lainnya diberikan kepada *developer* swasta untuk pembangunan komersial.

Linkage merupakan pendekatan yang bersifat langsung, *developer* diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan. Contoh membangun RSS untuk membangun rumah mewah.

Sumber pembiayaan melalui kekayaan Swasta-Pemerintah

Usaha Patungan (*Joint Venture*). *Joint Venture* merupakan kerjasama antara swasta dan pemerintah, dimana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah memadukan keunggulan pihak swasta seperti modal, teknologi dan kemampuan manajemen, dengan keunggulan dari pemerintah seperti sumber-sumber, kewenangan dan kepercayaan masyarakat.

BOT (*Built, Operation, Transfer*). BOT merupakan salah satu bentuk konsesi antara swasta dengan pemerintah. BOT atau bangun, guna, serah dengan pengertian swasta membangun, mengoperasikan dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Setelah masa konsesi, fasilitas atau infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan diserahkan kepada pemerintah.

BOO (*Built, Own, Operate*). Swasta investor yang membangun di atas tanah milik pemerintah daerah, setelah proyek langsung dihibahkan kepada pemerintah daerah dan investor da-

pat mengoperasikan dalam jangka waktu tertentu.

Sewa (*Leasing*). Dalam pola ini pemerintah menyewakan fasilitas untuk dioperasikan oleh swasta dengan *fee* tertentu. Swasta yang menanggung resiko komersial dan resiko lainnya, serta bertanggung jawab untuk menyediakan modal kerja, memelihara dan mengganti *asset* yang rusak. Tanggung jawab pemerintah pada *asset* tetap dan membayar hutang jangka panjang untuk waktu proyek terkait. Setelah akhir batas waktu perjanjian fasilitas diserahkan kepada pemerintah.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu survei instansional dan pengamatan lapangan. Survei instansional dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder, baik data-data numerik maupun data-data (dokumen) kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait.

Sedangkan pengamatan lapangan dilakukan terutama untuk pengecekan ulang (*cross-check*) data sekunder dengan fakta-fakta yang terjadi. Kegiatan terutama difokuskan untuk mengetahui komoditas wilayah yang mampu

nyai potensi untuk dikembangkan.

Alat Analisis

Alat yang digunakan adalah analisis deskriptif, *Location Quotient*, *Shift Share*, Indeks William-son, dan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes secara umum mengalami pertambahan di setiap tahunnya. Dalam rentang lima tahun dari tahun 2004-2008, jumlah penduduk terbesar berada di tahun 2008 yaitu sebanyak 1.747.430 jiwa sedangkan terendah di tahun 2004, dengan selisih sebesar 35.773 jiwa. Bila dibandingkan 5 tahun yang lalu penduduk Kabupaten Brebes bertambah sebesar 15.124 jiwa atau pertumbuhan rata-rata per tahun 0,17 persen. Sehingga walaupun jumlah penduduk bertambah namun pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung menurun, lihat *Tabel 2*.

Distribusi penduduk Kabupaten Brebes belum tersebar secara merata, dimana sebaran penduduk terbanyak di Kecamatan Bulakamba 158.412 jiwa atau 9,06 persen, Kecamatan

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Periode 2004-2009

No	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Salem	55.512	55.819	56.096	56.341	56.552	56.733
2	Bantarkawung	91.704	91.647	91.534	91.506	91.125	91.165
3	Bumiayu	100.843	101.406	102.231	103.100	102.798	102.626
4	Paguyangan	91.843	91.890	92.022	92.353	92.651	92.759
5	Sirampog	60.733	60.697	60.573	60.529	60.272	60.091
6	Tonjong	68.405	68.570	68.748	69.049	69.556	69.635
7	Larangan	139.307	137.128	138.071	139.374	140.087	140.544
8	Ketanggungan	130.622	130.812	131.009	131.164	131.335	131.668
9	Banjarharjo	115.537	115.691	115.775	115.916	116.04	116.024
10	Losari	122.549	122.893	123.288	123.597	123.941	124.193
11	Tanjung	91.272	91.717	92.470	93.691	95.118	96.423
12	Kersana	58.867	59.071	62.577	62.798	62.92	63.071
13	Bulakamba	156.218	157.333	157.665	157.880	158.412	158.593
14	Wanasari	133.423	134.823	136.613	137.404	137.901	138.236
15	Songgom	73.452	73.321	73.383	73.415	73.487	73.44
16	Jatibarang	79.905	79.747	79.561	79.577	79.517	79.567
17	Brebes	155.474	155.089	154.785	155.501	155.718	155.974
Kabupaten Brebes		1.722.306	1.727	1.736.401	1.727.705	1.736.398	1.747.430

Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka, 2009

Brebes 155.718 atau 8,91 persen, dan Kecamatan Larangan sebanyak 140.047 atau 8,02 persen. Sedangkan sebaran penduduk terkecil adalah Kecamatan Salem sebesar 56.552 atau 3,23 persen

Sarana Ekonomi

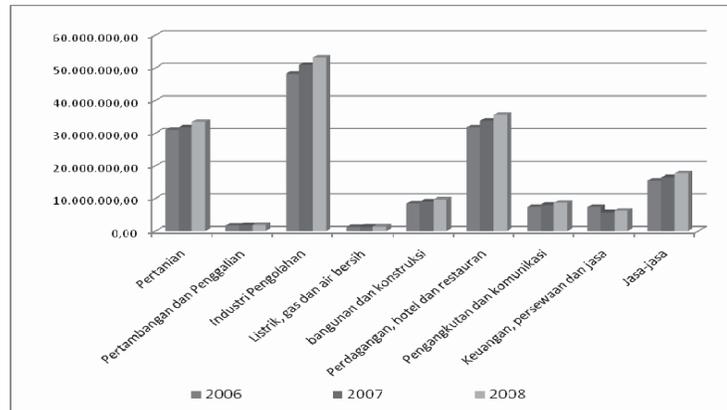
Sarana perekonomian yang berperan besar dalam pelayanan ekonomi di Kabupaten Brebes di antaranya yaitu pasar hewan/ikan, toko/warung, bank, badan per Kreditan, koperasi, KUD,

wilayah Kabupaten Brebes, diketahui bahwa dalam periode waktu tahun 2006-2008, kegiatan ekonomi pada sektor industri pengolahan adalah kegiatan yang memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap pembentukan nilai Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Brebes. Sektor lain yang juga mampu memberikan kontribusi yang relatif besar adalah perdagangan, hotel dan restoran serta pertanian. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan

TABEL 3.1. Sebaran Fasilitas Perekonomian Kabupaten Brebes Tahun 2007

No	Kecamatan	Jenis Sarana Perekonomian					Jumlah
		Pasar Hewan/Ikan	Toko/Warung	Rumah Makan	KUD	Lumbung Desa	
1	Salem	2	252	9	1	0	264
2	Bantarkawung	2	210	4	2	4	222
3	Bumiayu	3	627	54	1	7	692
4	Paguyangan	3	276	18	1	0	298
5	Sirampog	3	190	5	2	2	202
6	Tonjong	3	221	16	1	0	241
7	Larangan	4	426	66	1	6	503
8	Ketanggungan	4	464	28	3	6	505
9	Banjarharjo	2	447	18	3	6	476
10	Losari	1	282	261	1	2	547
11	Tanjung	2	642	44	4	14	706
12	Kersana	2	426	38	3	22	491
13	Bulakamba	4	365	78	4	7	458
14	Wanasari	2	335	68	1	4	410
15	Jatibarang	3	404	86	2	12	507
16	Songgom	2	105	17	1	0	125
17	Brebes	6	684	149	1	18	858
	Jumlah	48	6.356	959	32	110	7.505

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes dalam Revisi RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2007



Sumber: Data yang diolah

Gambar 1. Grafik PDRB Kabupaten Brebes Tahun 2006-2008

Sektor kedua yang memberikan pengaruh pada pembentukan PDRB adalah perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi terbesar dari sektor ini diberikan oleh perdagangan besar dan eceran, restoran, dan di urutan terakhir hotel.

Sektor ketiga yang memberikan pengaruh pada pembentukan PDRB adalah pertanian. Kontribusi terbesar diberikan oleh pertanian tanaman bahan makanan, peternakan dan hasilnya, kehutanan, perikanan, dan di urutan terakhir tanaman perkebunan.

Analisis Trend

Terkait dengan aliran pergerakan barang dan jasa intra serta inter Kabupaten, pada bagian ini terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi sektor strategis yang diarahkan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Brebes, dilihat dari potensi, penciptaan pendapatan dan

lapangan kerja, maupun interaksinya dengan sektor-sektor lain di dalam dan luar daerah sehingga dapat diketahui sektor yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Brebes sendiri dan berpotensi untuk bergerak ke luar wilayah.

Untuk mengetahui spesifikasi relatif sektor atau kegiatan ekonomi tertentu di suatu wilayah perencanaan, maka dapat digunakan Metode *Location Quotien* (LQ). Variabel pengukuran yang digunakan disini untuk melihat sektor basis wilayah, dimana untuk melihat komoditas yang berpotensi mendukung pengembangan wilayah adalah variabel Produk Domestik

Analisis perhitungan LQ di Kabupaten Brebes dihitung berdasarkan PDRB Kabupaten Brebes dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Brebes yang menjadi sektor basis disajikan dalam *Tabel 6*.

Tabel 4. PDRB Kabupaten Brebes Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000

Tahun	Tahun	Proyeksi
2008	0	483.881.120.000,00
2009	1	493.074.861.280,00
2010	2	502.443.283.644,32
2011	3	511.989.706.033,56
2012	4	521.717.510.448,20
2013	5	531.630.143.146,72
2014	6	541.731.115.866,50
2015	7	552.024.007.067,97
2016	8	562.512.463.202,26
2017	9	573.200.200.003,10
2018	10	584.091.003.803,16
2019	11	595.188.732.875,42
2020	12	606.497.318.800,05
2021	13	618.020.767.857,25
2022	14	629.763.162.446,54
2023	15	641.728.662.533,03
2024	16	653.921.507.121,15
2025	17	666.346.015.756,46
2026	18	679.006.590.055,83
2027	19	691.907.715.266,89

Sumber: Data yang telah diolah

Tabel 5. Strategi Pengembangan Investasi

Tahap Pengembangan Investasi	Periode	Prioritas	Sektor
I	2008-2012	1	Pertanian
		2	Industri Pengolahan
		3	Perdagangan, hotel dan restoran
		4	Jasa-jasa
II	2013-2017	5	Pengangkutan dan komunikasi
		6	Keuangan, persewaan dan jasa
III	2018-2022	7	Bangunan dan konstruksi
		8	Pertambangan dan Penggalian
IV	2023-2028	9	Listrik, gas dan air bersih

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Brebes, yang menjadi sektor basis adalah pertanian dalam artian luas, yaitu pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan dan perikanan. Sektor yang menjadi basis ini dapat lebih dikembangkan untuk menarik investor ke Kabupaten Brebes. Beberapa sektor *nonbasis* yang berpotensi mendekati sektor basis adalah sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi.

Analisis Shift Share

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di kawasan perencanaan. Analisis ini dihitung dengan membandingkan antara Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan menghasilkan *shift share* masing-masing sektor di kabupaten dibandingkan provinsi. Untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Brebes, maka hasil analisis tersebut dirata-rata, sehingga menghasilkan sektor unggulan di Kabupaten Brebes secara umum dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 6. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Brebes

No	Sektor	Hasil Perhitungan LQ			Keterangan
		2006	2007	2008	
1	Pertanian	2,3	2,3	2,2	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,9	0,9	Non basis
3	Industri Pengolahan	0,6	0,6	0,6	Non basis
4	Listrik, gas dan air bersih	0,8	0,9	0,9	Non basis
5	bangunan dan konstruksi	0,3	0,3	0,3	Non basis
6	Perdagangan, hotel dan restoran	0,8	0,8	0,9	Non basis
7	Pengangkutan dan komunikasi	1,2	0,9	0,9	Non basis
8	Keuangan, persewaan dan jasa	0,6	0,6	0,6	Non basis
9	Jasa-jasa	0,7	0,7	0,7	Non basis

Sumber: Data yang telah diolah

Sektor-sektor unggulan ekonomi di Kabupaten Brebes dapat dihitung dengan menggunakan analisis *shift share*. Perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) memiliki 3 komponen, yaitu:

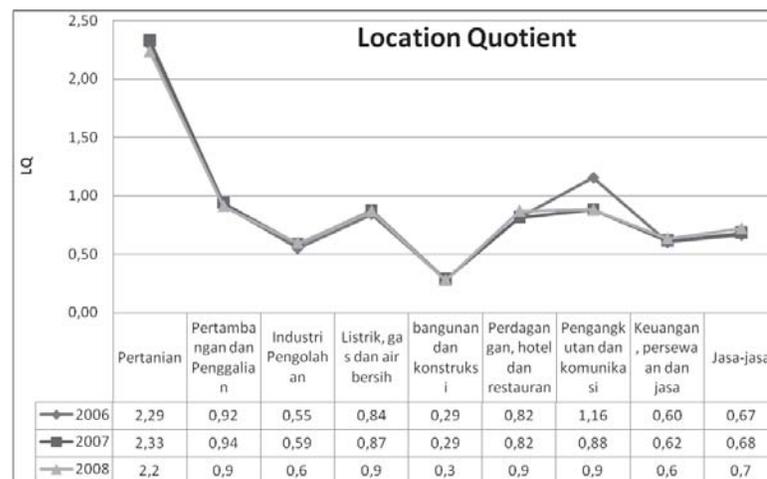
(1) *Komponen Pertumbuhan Wilayah* acuan (KPW) untuk mengukur perubahan kinerja ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.

(2) *Komponen Pertumbuhan Proporsional* (KPP) untuk mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti bahwa sektor tersebut berkembang dalam per-

ekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya

(3) *Komponen pergeseran atau pertumbuhan pangsa wilayah (KPK)* untuk mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis *shift share*, dapat disimpulkan dengan sistem kuadran. Kuadran I merepresentasikan sektor unggul karena baik KPK maupun KPP memiliki nilai positif, kuadran II menggambarkan sektor agak mundur karena KPK negatif namun KPP positif, kuadran III merepresentasikan sektor mundur karena KPK maupun KPP negatif,



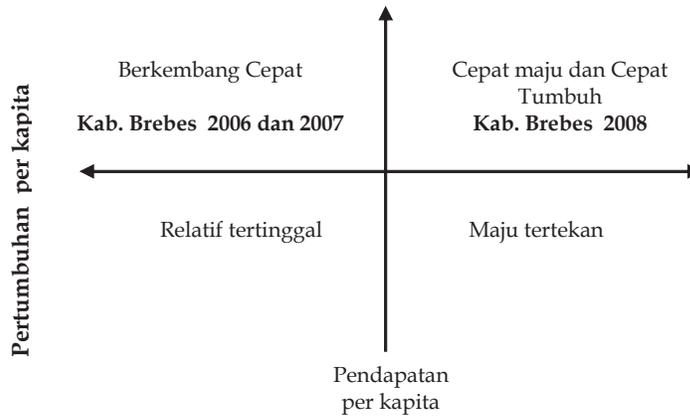
Sumber: Data yang telah diolah

Gambar 2. Grafik LQ Kabupaten Brebes

Tabel 9. Klasen Tipologi Kabupaten Brebes

Tahun	PDRB HK 2000		PENDAPATAN PER KAPITA	
	Kab. Brebes	Per Kecamatan	Kab. Brebes	Per Kecamatan
2006	4.551.196.990.000	267.717.470.000	2.323.962.350.000	2.621.052
2007	4.769.145.460.000	280.537.968.235	2.409.105.810.000	2.742.704
2008	4.998.528.180.000	294.031.069.412	4.998.528.180.000	2.864.120

Sumber: Data yang telah diolah



Gambar 3. Klasen Tipologi

kuadran V merupakan tempat kedudukan sektor agak unggul karena KPK positif sedangkan KPP negatif.

Analisis Klasen Tipologi

Analisis Tipologi Klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu

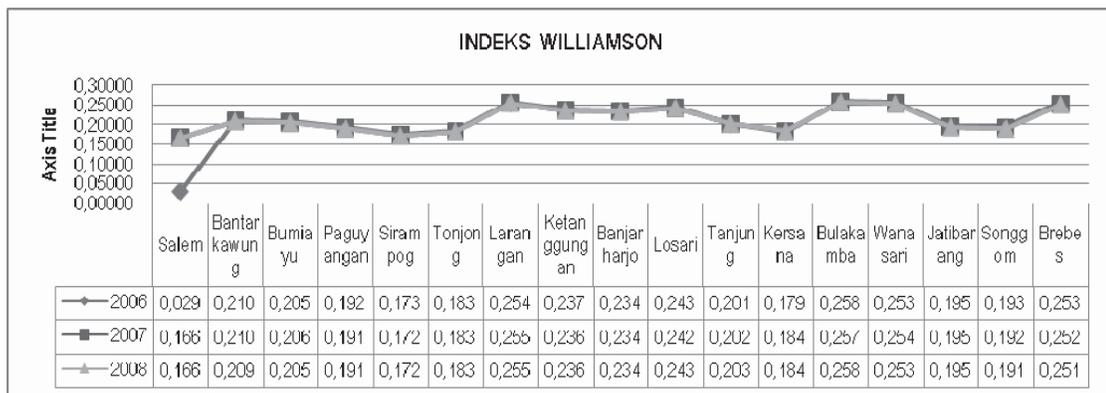
arah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Brebes, dan (6) Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Brebes.

Diketahui PDRB Kabupaten Brebes lebih

Tabel 10. Indeks Williamson Kabupaten Brebes

Kecamatan	2006	2007	2008
Salem	0,02964	0,16660	0,16686
Bantarkawung	0,21095	0,21016	0,20987
Bumiayu	0,20585	0,20623	0,20536
Paguyangan	0,19255	0,19167	0,19126
Sirampog	0,17364	0,17296	0,17236
Tonjong	0,18316	0,18303	0,18348
Larangan	0,25459	0,25539	0,25599
Ketanggungan	0,23760	0,23678	0,23667
Banjarharjo	0,23495	0,23438	0,23436
Losari	0,24309	0,24291	0,24324
Tanjung	0,20131	0,20209	0,20309
Kersana	0,17942	0,18422	0,18404
Bulakamba	0,25824	0,25779	0,25809
Wanasari	0,25388	0,25405	0,25391
Jatibarang	0,19582	0,19524	0,19510
Songgom	0,19361	0,19217	0,19125
Brebes	0,25391	0,25283	0,25187

Sumber: Data yang telah diolah



Gambar 4. Indeks Williamson

ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah akan menyebabkan ketimpangan terhadap pendapatan per kapita wilayah.

Hasil perhitungan Indeks Williamson diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di tujuh

belas kecamatan di Kabupaten Brebes tidak mengalami ketimpangan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes merata.

Strategi Umum Masing-Masing Sektor

Sektor Pertanian

Tabel 11. Strategi Pengembangan Pertanian

EFAS		OPPORTUNIES (O)	TREATHS (T)
		Faktor Peluang Eksternal	Faktor Ancaman Eksternal
IFAS		STRATEGI SO	STRATEGI ST
STRENGTH (S) Faktor Kekuatan Internal		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan masyarakat ▪ Pemberdayaan masyarakat usaha pertanian ▪ Perluasan jaringan pemasaran produk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan kebutuhan masyarakat ▪ Pemberdayaan masyarakat mandiri ▪ Peningkatan kualitas SDM dalam rangka pemasaran hasil pertanian
WEAKNESS (W) Faktor Kelemahan Internal		STRATEGI WO	STRATEGI WT
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian ▪ Peningkatan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian ▪ Pengembangan pertanian yang ramah lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan kualitas mutu hasil produksi pertanian ▪ Peningkatan pangsa pasar bagi produk pertanian ▪ Pengembangan modal usaha atau pemberian kredit lunak untuk pengembangan pertanian

Sumber: Data yang telah diolah

Perternakan

Tabel 12. Strategi Pengembangan Perternakan

EFAS		OPPORTUNIES (O)	TREATHS (T)
		Faktor Peluang Eksternal	Faktor Ancaman Eksternal
IFAS		STRATEGI SO	STRATEGI ST
STRENGTH (S) Faktor Kekuatan Internal		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan masyarakat ▪ Pemberdayaan masyarakat usaha perternakan ▪ Perluasan jaringan pemasaran produk perternakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan kebutuhan masyarakat ▪ Pemberdayaan masyarakat mandiri ▪ Peningkatan kualitas SDM dalam rangka pemasaran hasil perternakan
WEAKNESS (W) Faktor Kelemahan Internal		STRATEGI WO	STRATEGI WT
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas SDM di bidang perternakan ▪ Peningkatan teknologi budidaya perternakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian ▪ Pengembangan modal usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan kualitas mutu hasil produksi perternakan ▪ Peningkatan pangsa pasar bagi produk perternakan ▪ Pengembangan modal usaha atau pemberian kredit lunak untuk pengembangan perternakan

Sumber: Data yang telah diolah

Perikanan

Tabel 13. Strategi Pengembangan Perikanan

EFAS		
IFAS	OPPORTUNIES (O) Faktor Peluang Eksternal	TREATHS (T) Faktor Ancaman Eksternal
STRENGTH (S) Faktor Kekuatan Internal	STRATEGI SO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas SDM perikanan untuk mendukung program pengembangan di sektor perikanan ▪ Peningkatan daya dukung lingkungan budidaya perikanan ▪ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan 	STRATEGI ST <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan usaha perikanan yang berdaya saing tinggi ▪ Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan yang mempunyai standar mutu ▪ Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung pengembangan sektor perikanan
	WEAKNESS (W) Faktor Kelemahan Internal	STRATEGI WO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan ketrampilan SDM perikanan untuk meningkatkan kualitas SDM ▪ Peningkatan sarana prasarana guna mendukung pengembangan sektor perikanan ▪ Pengembangan modal usaha untuk meningkatkan usaha di bidang perikanan

Sumber: Data yang telah diolah

Perindustrian

Tabel 14. Strategi Pengembangan Perindustrian

EFAS		
IFAS	OPPORTUNIES (O) Faktor Peluang Eksternal	TREATHS (T) Faktor Ancaman Eksternal
STRENGTH (S) Faktor Kekuatan Internal	STRATEGI SO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan usaha budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan ▪ Pengembangan SDM di bidang perikanan dengan pendidikan dan pelatihan ▪ Peningkatan daya dukung lahan guna mendukung usaha dibidang perikanan ▪ Pemberdayaan masyarakat usaha nelayan 	STRATEGI ST <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing ▪ Perluasan daerah pemasaran dengan promosi produk yang dihasilkan ▪ Perluasan kerjasama dalam pengembangan usaha perikanan
	WEAKNESS (W) Faktor Kelemahan Internal	STRATEGI WO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan perluasan pemasaran hasil produksi dengan promosi ▪ Pengembangan kerjasama untuk peningkatan modal usaha ▪ Peningkatan sarana prasarana perikanan ▪ Peningkatan mutu produk perikanan

Sumber: Data yang telah diolah

Tabel 15. Strategi Pengembangan Pariwisata

EFAS	OPPORTUNIES (O) Faktor Peluang Eksternal	TREATHS (T) Faktor Ancaman Eksternal
IFAS		
STRENGTH (S) Faktor Kekuatan Internal	STRATEGI SO <ul style="list-style-type: none"> Memaksimalkan event pariwisata yang berkembang di Kabupaten brebes Meningkatkan promosi wisata untuk menarik investor untuk dapat ikut serta dalam pengembangan wisata 	STRATEGI ST <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten brebes peningkatan kinerja kemampuan, ketrampilan SDM pariwisata dalam perencanaan, perawatan dan pemeliharaan obyek wisata Peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana pendukung pariwisata Pengembangan paket wisata dalam perencanaan pariwisata
	WEAKNESS (W) Faktor Kelemahan Internal	STRATEGI WO <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan perencanaan paket wisata, sehingga wisatawan mendapatkan informasi yang lengkap tentang wisata yang ada Mempermudah perijinan investor dalam mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Brebes

Sumber: Data yang telah diolah

Strategi Rencana Umum Pengelolaan Investasi Kabupaten Brebes

bang. (2) *Strategi Rapid Growth*: Strategi ini memanfaatkan semua peluang dengan memper-



Strategi IV

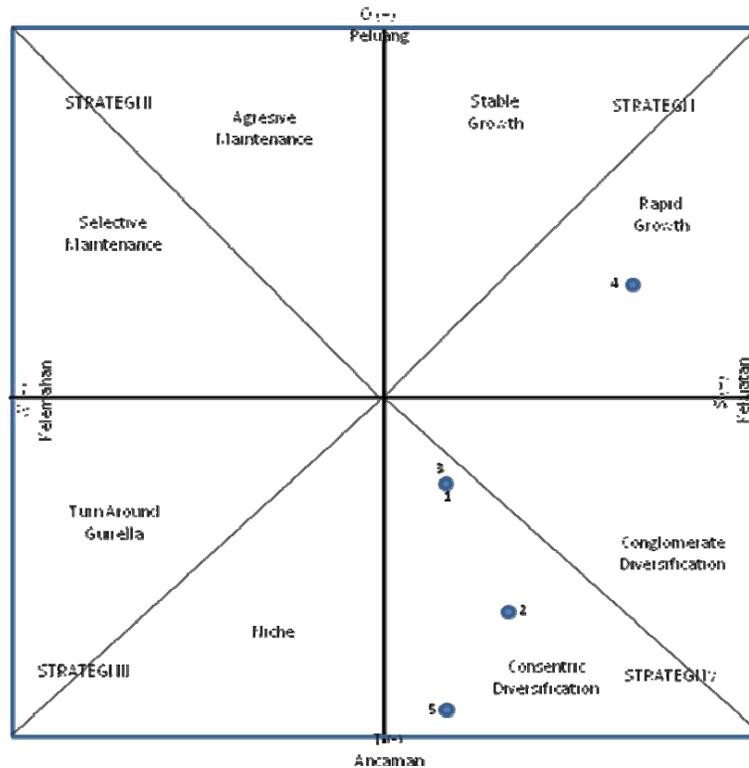
(1) Strategi *Concentric Diversification*. Strategi ini menambah produk atau jasa yang baru dan masih berhubungan; (2) Strategi *Conglomerate Diversification*. Strategi ini menambah produk atau jasa yang tidak saling berhubungan.

Hasil dari Analisis SWOT dapat disusun formulasi strategi umum sebagaimana tampak dalam *Gambar 5*.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa Posisi Strategis masing-masing sektor dapat dilihat pada *Gambar 5*.

bertahan dari persaingan industri, yaitu dengan pengembangan dan pengoptimalan potensi yang ada, peningkatan sarana prasarana perindustrian.

(2) Posisi strategis IV: pertanian, perternakan, perikanan, pariwisata. Posisi strategis IV menggambarkan perkembangan sektor pertanian, perternakan, perikanan dan pariwisata sangat didukung oleh variabel internal yang banyak memberikan kekuatan bagi perkembangan sektor tersebut. Sedangkan untuk variabel eksternal lebih memberikan ancaman bagi pengembangan sektor. Sehingga dalam pe-



Keterangan: 1 = Pertanian; 2 = Perternakan; 3 = Perikanan; 4 = Perindustrian; 5 = Pariwisata

Gambar 5. Posisi Strategis

lahan yang mungkin timbul sebagai ancaman pengembangan sektor tersebut.

Strategi Pengembangan Investasi

Seiring dengan proses peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka kegiatan investasi program-program pembangunan perkotaanpun harus merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat. Investasi yang dikembangkan dalam kegiatan pembangunan perkotaan harus bertumpu pada kemampuan masyarakat dalam pendanaan dan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Pengembangan investasi yang ada di Kabupaten Brebes diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada seperti investasi di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta industri kecil menengah. Program investasi yang dapat dilakukan berupa (1) Penanaman modal investasi produktif, (2) Bantuan permodalan investasi, (3) Modal kerja untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, (4) Pengembangan teknologi tepat guna, (5)

tas masyarakat atau rakyat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya; (3) Mengembangkan keanekaragaman hasil yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan; (4) Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan; (5) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat atau rakyat; dan (6) Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah dan kawasan demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

SIMPULAN

Masterplan investasi di Kabupaten Brebes ini disusun untuk mendapatkan gambaran tentang peluang-peluang investasi yang dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Brebes. Sektor yang potensial yang menjadi prioritas utama untuk diinvestasikan mengingat memiliki prospek keuntungan yang besar adalah sektor perindustrian, kemudian untuk prioritas sektor kedua adalah pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata. Dengan total investasi

Tahap I Tahun 2008 dengan total investasi:

Rp483.881.120.000,00;

Tahap kedua Tahun 2013 sebesar:

Rp531.630.143.146,72,

Tahap ketiga tahun 2018 sebesar:

Rp584.091.003.803,16;

Tahap keempat Tahun 2023 sebesar:

Rp. 641.728.662.533,03; dan

Tahap keempat tahun 2028 sebesar:

Rp.705.053.961.856,96.

Rekomendasi. Peranan pemerintah Kabupaten Brebes dalam strategi pengembangan investasi adalah: *Entrepreneur*, pemerintah bertanggungjawab menjalankan melalui pengembangan usaha sendiri/BUMD sehingga aset-aset pemerintah daerah dapat dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan. *Koordinator*, pemerintah daerah menerapkan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan daerahnya. *Fasilitator*, Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya melalui pengaturan

penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik. *Stimulator*, Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor masuk ke Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, A.W. 2001. *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Widjaja, A.W. 1992. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Balai Penerbitan Panca Usaha. 2001. *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung: CV. Laksana Mandiri
- Hakim, Saeful. Ernan Rustiadi, Dyah R. Panuju, dkk. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Siang Pleno ke-10. Kebijakan Dalam Rangka Otonomi Daerah. Batam. 13-14 April 2001.
- Kiswanto, Eddy. 2005. Analisis Spasial Ekonomi Makro Jawa Tengah (Analisis PDRB Tahun 1993-2003). *Forum Geografi*. Vol. 19(2) Desember 2005: 154.
- Lewis, Richard. 1993. *Quantitative Approaches to Management*. New York: Mc.Graw Inc.
- Malarangeng, Andi. 2001. *Otonomi Daerah, Perspektif, Teoritis, dan Praktis*. Malang: Bigraf Publishing.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kennet Davey dan Roy Kelly, 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Maskur, Nur Rifai. 2001. *Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*. Depok: PT Permata Artistika Kreasi
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit: PT. Grasindo.
- Perda Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010.
- Perda Kabupaten Brebes No. 15 Tahun 2001 tentang *Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes 2001-2010*
- Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2008 tentang *rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012*
- Perda Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes*
- Perda Kabupaten Brebes No. 4 Tahun 2006 tentang *Kemitraan Daerah*
- PP No. 44 Tahun 1997 tentang *Kemitraan*
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- PP RI No. 1 Tahun 2008 tentang *Investasi Pemerintah*
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.
- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Roy, Bahl. 1999. *Implementation Rule Fiscal Decentralisation*. Atlanta: International Studies Program School of Policy Studies. Georinia State University.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana
- Sutawijaya, Adrian. 2004. *Analisis Disparitas*

- Pendapatan Antardaerah dan Potensi Relatif Secara Sektoral. *Jurnal STEI*. No. 03. Hlm. 34 - 51
- Tambunan, Tulus. 2000. *Jurnal Pasar Modal Indonesia*. Jakarta
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional*
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antarPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*